

Mendorong Sektor Pendidikan di Perdesaan

Thomas Soseco
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang
Email: thomassoseco@gmail.com

Abstract

Rural plays role as a supporting area for urban. Rural's main activity is agriculture and natural resources exploitation. In recent years, agricultural sector in rural area has been kicked out by other sectors. The implication is there is a shift in employment. This condition will influence income distribution in rural areas and then affects education sector. The research's method is descriptive quantitative using secondary data provided by Indonesian Statistic Bureau (BPS). The change in rural's economy pattern is proxied by population aged 15 years or over who work by main industry. Education's quality is proxied by enrollment rate. The result of this research are: (1). There is positive relationship between the decreasing number of employment rate in agricultural sector and better income distribution in rural areas. (2). Better income distribution drives to higher enrollment rate. The recommendation is education should be developed better in order to prevent employee to work in sectors other than agriculture.

Keywords: rural, agriculture, education, enrollment rate

PENDAHULUAN

Desa dan kota seharusnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Kaitan simbiosis mutualisme tersebut tampak dari peran yang dilaksanakan oleh masing-masingnya. Desa merupakan sumber bahan baku bagi kota, sumber bahan makanan serta sumber tenaga kerja. Kota berfungsi sebagai tempat pemasaran bagi produk-produk dari desa. Kota juga mengalirkan pendapatan dan barang-barang manufaktur ke desa-desa. Hubungan yang seperti ini seharusnya dapat mendorong kota dan desa untuk tumbuh bersama-sama.

Desa dan kota memiliki ciri yang berbeda. Wilayah-wilayah yang memiliki corak masyarakat desa disebut dengan perdesaan. Sementara wilayah yang memiliki corak perkotaan, disebut dengan perkotaan. Terdapat perbedaan corak kehidupan di perdesaan dan perkotaan. Selain itu, terdapat fenomena semakin banyaknya wilayah dimana unsur perdesaannya semakin berkurang dan digantikan oleh unsur perkotaan. Semakin bergesernya sifat perdesaan menjadi perkotaan dapat dilihat dari berbagai indikator. Beberapa diantaranya adalah semakin berkurangnya penduduk yang bekerja di lapangan usaha yang merupakan lapangan usaha khas perdesaan, yakni sektor pertanian.

Berkurangnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian berpotensi mempengaruhi kesejahteraan penduduk perdesaan. Hal ini kemudian akan mempengaruhi kondisi pendidikan di perdesaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana pergeseran kehidupan penduduk di perdesaan dari sisi ekonomi dapat mempengaruhi sektor pendidikan.

Definisi Desa dan Kota

Mendefinisikan desa dan kota merupakan satu langkah awal untuk menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan wilayah administrasi terkecil. Keberadaan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan PP tersebut pasal 1, yang dimaksud desa adalah “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Sebagai sebuah wilayah administrasi, desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana pemerintah. Konsekuensi logis yang muncul dari pengertian wilayah administrasi dan sebagai suatu kawasan, maka desa memiliki berbagai fungsi, seperti tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan aktivitas/transaksi ekonomi.

Namun demikian, desa kadangkala sudah terpengaruh oleh unsur perkotaan. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kota didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Peraturan Mendagri No. 4 Tahun 1980, kota adalah suatu wadah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya Ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Desa yang sudah terpengaruh oleh kota pada umumnya sudah mulai meninggalkan unsur desa dan lebih banyak mengadopsi unsur kota. Dengan kata lain, perdesaan telah menjadi perkotaan.

Perdesaan dan Perkotaan

Perdesaan (*rural*) merupakan suatu bentuk kata sifat (*adjective*) dari desa (*village*). Sementara desa (*village*) merupakan suatu bentuk kata benda (*noun*). Dengan kata lain, desa merujuk ke suatu tempat atau lokasi tertentu sekumpulan masyarakat yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri serta memenuhi aspek-aspek disebut sebagai sebuah desa. Sementara perdesaan merujuk pada sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah wilayah yang disebut desa.

Menggunakan konsep yang sama, perkotaan (*urban*) merupakan kata sifat dari kota (*city*). Kota yang merupakan satu konsep kewilayahan memiliki unsur-unsur atau sifat yang disebut perkotaan (*urban*). Perbedaan antara perdesaan dan perkotaan dapat ditinjau dari berbagai aspek (www.revolusidesa.com):

1. Kepadatan penduduk. Perkotaan memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi daripada perdesaan. Hal ini berpengaruh pada pola pembangunan perumahan bangunan di perkotaan cenderung ke arah vertikal sementara di perdesaan cenderung ke arah horizontal.

2. Lingkungan hidup. Perdesaan lebih dekat dengan alam. Wilayah perdesaan didominasi dengan ruang terbuka hijau dengan banyak tanaman dan pepohonan di pekarangan rumah warganya. Hal ini berbeda di perkotaan dimana ruang terbuka hijau semakin menyempit dan digantikan dengan bangunan atau lapisan aspal.
3. Mata pencaharian penduduk. Kondisi kepadatan penduduk di perkotaan membatasi ruang gerak masyarakat untuk mencari mata pencaharian yang berbasis eksploitasi alam. Kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lebih banyak di perdesaan. Sementara kegiatan di bidang industri dan jasa banyak berkembang di perkotaan.
4. Stratifikasi sosial. Lebih berkembangnya pekerjaan di bidang industri dan jasa di perkotaan menuntut adanya keragaman pekerja bila dibandingkan dengan pekerjaan di perdesaan. Hal ini membawa adanya spesialisasi yang lebih beragam, seperti teknisi, akuntan, montir, supir, dan koki. Adanya spesialisasi tersebut juga akan membawa implikasi adanya perbedaan penghasilan dan kemudian akan menghasilkan kondisi ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin.
5. Corak kehidupan. Perkotaan memiliki corak kehidupan yang lebih heterogen dibandingkan di perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam suku, agama, latar belakang, yang mendiami wilayah perkotaan.
6. Pola interaksi. Penduduk perkotaan pada umumnya tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan tetangganya. Hal ini membuat mereka bersikap tidak menggantungkan diri pada orang lain. Kondisi ini berkembang ke arah individualistik. Berbeda dengan di perdesaan dimana masyarakatnya masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, sehingga unsur kebersamaan lebih terasa.
7. Solidaritas sosial. Penyelesaian konflik atau sengketa yang muncul di perdesaan dilandasi atas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan. Sementara di perkotaan, penyelesaian konflik cenderung diselesaikan dengan jalur formal.

Interaksi Desa dan Kota

Perbedaan yang signifikan antara perdesaan dan perkotaan hendaknya tidak dimaksudkan untuk mendikotomikan antara keduanya. Desa dan kota sejatinya tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Desa sebagai penyedia bahan kebutuhan bagi kota, seperti pangan, air bersih, dan bahan bangunan. Sementara kota berfungsi sebagai tempat pengolahan dan pemasaran bagi produk-produk dari desa.

Di sisi lain, permasalahan yang terjadi di desa juga dapat berimbas ke kota. Sebagai contoh, semakin berkurangnya lapangan pekerjaan di desa akan mendorong penduduknya untuk bermigrasi ke kota. Urbanisasi yang tidak terkendali akan menyebabkan berbagai masalah di kota, seperti kepadatan penduduk yang tinggi, ketidakmampuan kota untuk menyediakan fasilitas sosial, dan akhirnya berakibat pada berbagai masalah sosial seperti meningkatnya potensi gesekan horizontal dan meningkatnya angka kriminalitas.

Sebaliknya, permasalahan di kota juga dapat berimbas ke desa. Kota sebagai tempat pengolahan dan pemasaran produk-produk dari desa juga rentan terhadap kelesuan ekonomi. Jika ini terjadi, akan terjadi penurunan produksi industri di perkotaan, yang kemudian akan berdampak pada semakin berkurangnya aliran

uang yang diterima desa. Hal ini berpotensi melahirkan sejumlah masalah sosial di desa, termasuk di antaranya adalah masalah kualitas manusia di perdesaan.

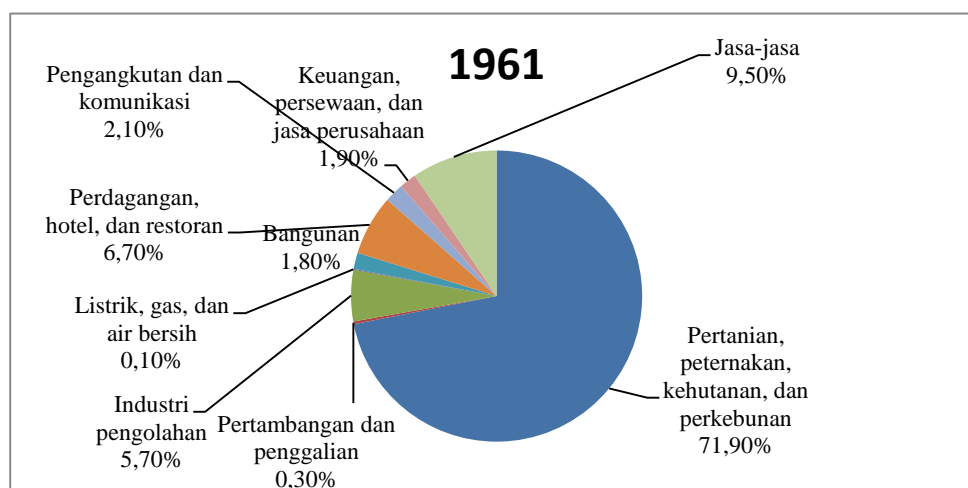
Pengukuran kualitas manusia dapat dilakukan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut (BPS, 2015). Semakin tinggi APS menunjukkan semakin banyak anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang sesuai. APS juga dapat dibedakan antara perdesaan dan perkotaan. Di Indonesia, APS didapat dari survei sosial ekonomi nasional (susenas), yang mengumpulkan data antara lain bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya.

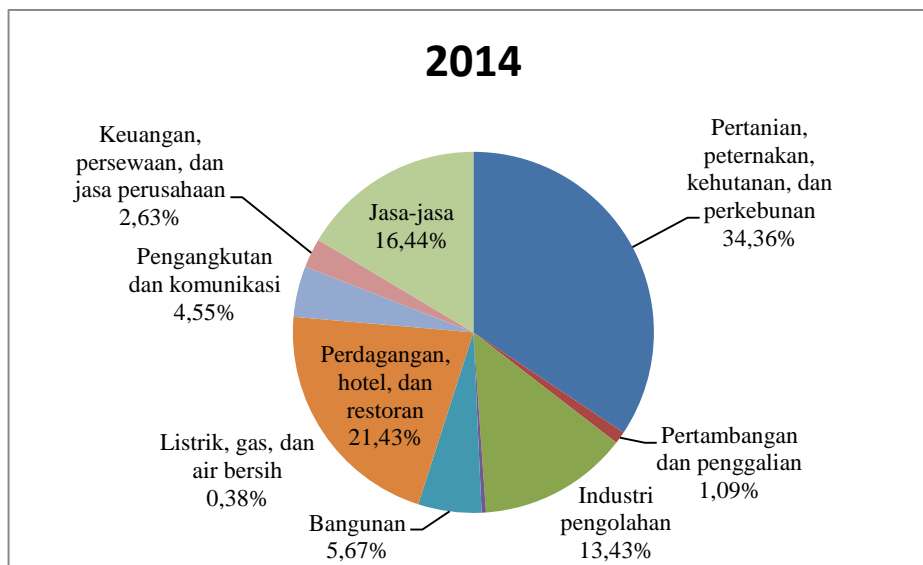
METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 237.641.326 jiwa. Penduduk yang tinggal di perkotaan hampir berimbang dengan penduduk yang tinggal di perdesaan. Jumlah penduduk di perkotaan adalah 118.320.256 jiwa sementara di perdesaan berjumlah 119.321.070 jiwa. Bila dilihat dari struktur perekonomian, terjadi kecenderungan perubahan struktur ekonomi Indonesia dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Pada periode yang 1961-2014, terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor industri dan jasa-jasa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.





Gambar 1. Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha, 1961-2014 (BPS, 2015)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat terjadi penurunan persentase pekerja yang bekerja di sektor pertanian (yang terdiri dari subsektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perkebunan) dari sebesar 72% pada tahun 1961 menjadi sebesar 34% pada tahun 2014. Pada periode 1961-2014 terjadi peningkatan pekerja di sektor industri pengolahan (dari 6% menjadi 13%), perdagangan, hotel, dan restoran (dari 7% menjadi 21%), dan jasa-jasa (dari 9% menjadi 17%).

Dari sisi ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari Rasio Gini. Rasio Gini memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai Gini yang lebih kecil dari 0,40 menunjukkan kondisi ketimpangan rendah. Nilai Gini antara 0,40 dan 0,49 menunjukkan kondisi ketimpangan menengah. Sementara nilai Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan kondisi ketimpangan tinggi. Dalam kurun waktu 50 tahun terjadi peningkatan kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Gini Rasio, 1964-2014

| Tahun | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan dan Perdesaan |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1964 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| 1970 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| 1980 | 0,36 | 0,31 | 0,34 |
| 1990 | 0,34 | 0,25 | 0,32 |
| 1999 | 0,33 | 0,24 | 0,31 |
| 2010 | 0,38 | 0,32 | 0,38 |
| 2014 | 0,43 | 0,32 | 0,41 |

Sumber: BPS (2015), Hill (1996)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia tergolong rendah dan bergerak menuju ke arah penurunan kondisi ketimpangan pada periode 1964-1999. Kemudian terjadi peningkatan kondisi ketimpangan pada periode 1999-2014. Sementara itu, melihat perbandingan perkotaan dan perdesaan, kondisi ketimpangan di perdesaan relatif lebih rendah daripada di perkotaan.

Dari sisi pendidikan, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan besarnya persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) (BPS, 2015). APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari

penduduk usia tertentu dan menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Terdapat peningkatan APS baik untuk perkotaan dan perdesaan pada periode 1961-2014, seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah (Persen), 1961-2014

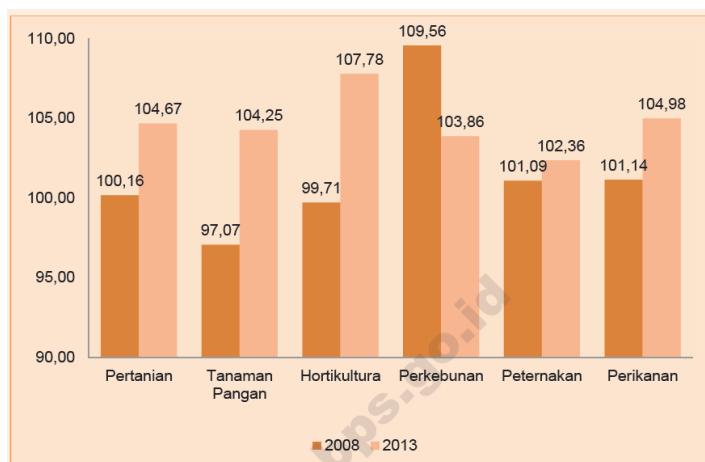
| Kelompok Umur | 1961 | 1971 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7-12 tahun | | | | | | | |
| Perkotaan | 74,5 | 73,0 | 91,7 | 95,1 | 97,3 | 98,8 | 99,4 |
| Perdesaan | 51,5 | 57,4 | 81,4 | 90,0 | 94,4 | 97,4 | 98,5 |
| 13-15 tahun | | | | | | | |
| Perkotaan | 67,9 | 63,2 | 78,1 | 79,4 | 88,3 | 90,2 | 96,5 |
| Perdesaan | 33,4 | 40,0 | 54,9 | 58,2 | 73,8 | 82,7 | 92,6 |
| 16-18 tahun | | | | | | | |
| Perkotaan | 38,6 | 41,4 | 53,2 | 59,2 | 66,7 | 62,9 | 74,9 |
| Perdesaan | 10,9 | 16,1 | 23,0 | 30,1 | 38,4 | 48,7 | 65,4 |

Sumber: BPS (2015)

Selama 50 tahun terakhir, APS mengalami peningkatan secara nyata, baik pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, maupun 16-18 tahun. Hampir seluruh anak umur 7-15 tahun memperoleh kesempatan untuk bersekolah pada jenjang pendidikan dasar, terlihat dari tingginya nilai APS tahun 2014 pada kelompok umur 7-12 tahun (98,9%) dan kelompok umur 13-15 tahun (94,4%) (BPS, 2015)

Kondisi perbedaan kualitas pendidikan justru terlihat dari perbedaan APS antara perdesaan dan perkotaan. APS di perdesaan untuk setiap kelompok umur selalu lebih rendah daripada di perkotaan. Pada tahun 2014, pada kelompok umur 7-12 tahun, APS di perdesaan yaitu sebesar 98,5%. Nilai ini lebih rendah daripada APS perkotaan sebesar 99,4%. Sementara pada kelompok umur 16-18 tahun, terdapat jarak yang cukup nyata antara perkotaan dan perdesaan, yaitu 74,9% dibanding 65,4%.

Penelitian ini menghasilkan temuan adanya hubungan positif dan signifikan antara penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan kondisi ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) (BPS, 2014). Pada tahun 2013, NTP petani adalah 104,67. Nilai ini menunjukkan daya beli petani hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Dengan kata lain, kemampuan petani untuk menyisihkan uang untuk ditabung sangatlah rendah.



Gambar 2. Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor, 2008-2013 (BPS, 2014)

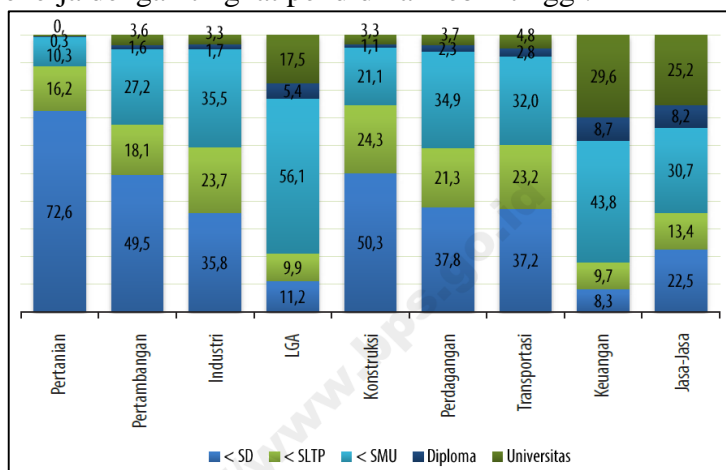
Gambar 2 menunjukkan di antara berbagai subsektor pertanian, peternakan memiliki NTP yang paling rendah di tahun 2013, yaitu sebesar 102,36. Artinya, surplus pendapatan di subsektor ini sangat kecil. Sebaliknya, subsektor hortikultura memiliki NTP yang paling tinggi di tahun tersebut.

Selain itu, perpindahan pekerja di sektor pertanian ke sektor nonpertanian juga disebabkan disparitas pendapatan yang lebar antara pekerja di sektor pertanian dan sektor-sektor lain. Pekerja di sektor pertanian pada tahun 2013 rata-rata mendapat upah Rp. 612.300 per bulan sementara pekerja di sektor industri mendapat upah rata-rata Rp. 1.062.900 per bulan dan pekerja di sektor jasa mendapat upah Rp. 840.600 per bulan (BPS, 2014).

Perpindahan pekerja di sektor pertanian ke sektor lain akan menyebabkan semakin meratanya distribusi pendapatan di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerja yang meninggalkan sektor pertanian akan membuat semakin langkanya pekerja yang tersisa di sektor tersebut. Hal ini akan mendorong peningkatan upah nominal buruh tani. Pada tahun 2009 para petani mendapat upah rata-rata Rp. 36.800 per hari. Upah ini kemudian meningkat menjadi Rp. 41.900 per hari pada tahun 2013. Peningkatan upah tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan.

Pemerataan distribusi pendapatan tersebut kemudian akan mendorong peningkatan APS di perdesaan. Dampak yang paling kuat adalah pada anak usia 7-12 tahun. Kemudian semakin melemah berturut-turut pada kelompok umur 12-15 tahun dan 15-18 tahun. Meningkatnya APS juga disebabkan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur sekolah, pemberian Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Siswa Miskin. Namun, peningkatan upah petani masih belum mampu secara signifikan mendorong peningkatan APS. Hal ini disebabkan masih mahal biaya dan jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk ke sekolah (BPS, 2014). Selain itu, pendidikan orang tua juga berpengaruh dalam keputusan untuk bersekolah bagi anak-anak mereka (Chang, 2006).

Berdasarkan gambar 3, pada tahun 2013, sebagian besar pekerja di sektor pertanian berpendidikan SD. Mereka dapat dengan mudah pindah kerja ke sektor lain (seperti konstruksi, pertambangan, per-dagangan, dan transportasi) yang sama-sama membutuhkan pekerja yang sebagian besar tidak berpendidikan tinggi. Para pekerja dari sektor pertanian tidak akan mudah masuk ke sektor listrik, gas, dan air bersih atau sektor keuangan dan sektor jasa dimana sektor-sektor tersebut membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi.



Gambar 3. Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan, 2013 (BPS, 2014)

Pembangunan pendidikan di perdesaan harus diarahkan untuk juga memberi dampak luas bagi perdesaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena keberhasilan sektor pendidikan justru dapat membuat masyarakat di perdesaan mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Dengan masih terbukanya peluang kerja bagi pekerja di sektor pertanian untuk pindah ke sektor lain, ditambah dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang tetap bertahan, maka sektor pertanian akan semakin terpuruk.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pergeseran corak perdesaan ke arah lebih bercorak perkotaan ditandai dengan menurunnya jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Penurunan tersebut akan mendorong pemerataan distribusi pendapatan di perdesaan.
2. Perbaikan distribusi pendapatan di perdesaan akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Dampak yang paling kuat adalah pada kelompok umur 7-12 tahun, kemudian semakin lemah berturut-turut pada kelompok umur 12-15 tahun dan 15-18 tahun.

Saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Meski terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), pekerja tetap perlu didorong untuk membangun perdesaan dengan cara bekerja di sektor pertanian dan bukannya malah bekerja di sektor nonpertanian.
2. Peningkatan APS di perdesaan harus diarahkan untuk memperbaiki masih adanya perbedaan APS perdesaan dan perkotaan.

Daftar Rujukan

- BPS. 2011. Profil Anak Indonesia 2011
- BPS. 2014. Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia
- BPS. 2014. Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia: Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus Pertanian 2013.
- BPS. 2014. Indikator Pertanian 2013/2014
- BPS. 2014. Statistik Pendapatan 2013
- BPS. 2015. Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka
- Hartono, Tony. 2006. Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hill, Hal. 1996. Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komparatif. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- Hubeis, Aida Vitalaya, dkk. 2011. Menuju Desa 2030. Arif Satria, Ernan Rustiadi, dan Agustina M. Purnomo (Eds). Bogor: Crespent Press
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- revolusidesa.com/category/page/fakta_desa/31/PERBEDAAN-DESA-DAN-KOTA diakses tanggal 25 Oktober 2015